

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016 BADAN KELUARGA BERENCANA



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah/ PERDA Nomor 03 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008) dan diperkuat dengan Peraturan Bupati nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

Penyusunan RENJA Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 juga berdasarkan pada ketentuan dan pendekatan perencanaan nasional seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 Tahun 2010. RENJA Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 berfungsi sebagai salah satu dokumen perencanaan penting dalam pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Musi Rawas untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana Nomor: 109/KPTS/BKB/2015 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan RENCANA KERJA (RENJA) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 ini, dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan serta akuntabilitas pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas pada khususnya di semua tingkatan.

Kepada Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya dan juga kepada semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan tenaga dalam menyusun RENJA Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 ini, kami sampaikan juga penghargaan serta ucapan terima kasih.

Muara Beliti, Juli 2015

**KEPALA
BADAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

**Drg. Hj. MIPTA HULUMMI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198511 2 001**

Tim Penyusunan RENJA 2015 Badan KB Kab. MURA :

Pengarah : Drg. Hj. MIPTA HULUMMI, M.Kes (Kepala Badan)
Penanggungjawab : RUSLAN, SE (Sekretaris Badan)
Ketua : A. ASRON ARFINSIE, SH
Wakil Ketua : Drs. IRWANSYAH
Sekretaris : SASTATI, S. Sos
Anggota : 1. Drs. SUPARDIYONO
2. H. SYAHRUL, S. Sos, MM
3. Hj. FITRIANA, SH
4. SRI HARTATI, SE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan Renja	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
B. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	11
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ...	14
D. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	17
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	21
C. Program dan Kegiatan	23
BAB IV. PENUTUP	27
LAMPIRAN (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraaan Maju Tahun 2017 Badan KB Kabupaten Musi Rawas)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun. Pada pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana kerja (Renja) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang berisi Rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) tahun 2016 Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021 dengan prioritas kebijakan pada pembangunan kualitas hidup manusia, point 5 pada Agenda Nawacita Pemerintah dan mendorong pada pengentasan kemiskinan guna mewujudkan keluarga yang berencana dan sejahtera dengan memberdayakan potensi lokal daerah yang tersusun melalui hierarki sistem perencanaan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 disusun selaras dengan VISI yaitu **Pembangunan Kependudukan untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas melalui Program Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera** yang merupakan salah satu upaya yang terpenting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kualitas hidup manusia dan pengembangan SDM serta pengentasan kemiskinan maupun guna melestarikan hasil-hasil pembangunan sehingga pengendalian pertumbuhan penduduk baik kuantitas maupun kualitas meningkat. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menjalankan misi yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Kependudukan dengan keseimbangan kuantitas dan kualitas yang berkonsentrasi pada :
 - ✓ Menurunkan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk
 - ✓ Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (CPR) cara modern
 - ✓ Menurunkan disparitas angka kelahiran total (TFR)
 - ✓ Menurunnya kebutuhan KB tidak terlayani (Unmet need) dari PUS
 - ✓ Meningkatnya kesertaan ber KB PUS dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
 - ✓ Penyediaan analisis data dan informasi penyeimbangan penduduk, KB dan pembangunan keluarga sejahtera

Adapun program yang dilaksanakan, sebagai berikut :

- 1) Program Keluarga Berencana,
- 2) Program Pelayanan Kontrasepsi
- 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

2. Mewujudkan keluarga sejahtera berkualitas yang berkonsentrasi pada :
 - ✓ Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) dg keluarga anak ideal, sehat dan berpendidikan
 - ✓ Pemenuhan hak-hak reproduksi keluarga
 - ✓ Peningkatan ketahanan keluarga
 - ✓ Peningkatan kesejahteraan keluarga

Adapun program yang dilaksanakan, sebagai berikut :

- 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- 2) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- 3) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;

- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
- 7 Undang-Undang No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124) ;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
- 12 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 ;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas No. 27 Tahun 2015 Tentang Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
15. Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Nomor : 109/KPTS/BKB/2015 tentang Penunjukan Tim Penyusunan RENJA Badan KB Tahun 2016.

3.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 adalah memberikan arah dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan dalam pelayanan pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Sedangkan tujuan dari dibuatnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 adalah menyediakan satu pedoman dalam menentukan arah pelaksanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada kondisi yang nyata dan proyeksi kegiatan kedepan.

4.1 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

(Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraaan Maju Tahun 2017 Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pelaksanaan Evaluasi Renja SKPD Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 merupakan pencapaian kinerja pada Tahun 2015 yang menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan perolehan nilai capaian kinerja rata-rata.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.
Pengukuran dan Pencapaian Kinerja
Badan Keluarga Berencana Tahun 2015
(s.d Mei 2015)

1. Tujuan Pertama : Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan keluarga berencana

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.1.	Menurunkan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk	1	Jumlah Peserta KB Baru/PB	17.192	100	5041	29,32
		2	Jumlah Peserta KB Aktif/PA	402.679	100	304.922	75,72
		3	Persentase Peserta KB Baru MKJP	1.212	100	1.756	144,88
		4	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	10277	100	100.976	982,54
		5	Persentase Peserta KB Baru Pria	333	100	299	89,79
1.1.2.	Menurunnya disparitas TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,2	100	3,4	95,06
		2	Cakupan PUS yang ber KB umur khusus (ASFR) 15 - 19 Tahun	6,618	100	5.563	84,06

1.1.3.	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi	1	Cakupan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun (Target Nasional 3,5% per tahun)	7,530	100	7.563	100,44
		2	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 85% per tahun	402.679	100	304.922	75,72

1.1.4.	Menurunnya kebutuhan KB tidak terlayani (unmetneed) dari PUS	1	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terlayani (unmetneed) Target Nasional 5 % per tahun	25,540 PUS=84.933	100	21,954	85,96
--------	--	---	---	----------------------	-----	--------	-------

1.1.5.	Meningkatnya kesertaan ber KB PUS Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	1	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB (Target 87 % pertahun)	24,039 PUS Pra S+KS I=34.595	100	24,271	100,97
--------	---	---	---	------------------------------------	-----	--------	--------

2. Tujuan Kedua : Peningkatan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi PUS tentang kesehatan reproduksi, melindungi peserta KB dari dampak negative penggunaan alat dan obat kontrasepsi, peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang efektif dan efisien untuk jangka panjang

2.2.1.	Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku (PSP) masyarakat khususnya PUS, Remaja dan Anggota Keluarga Lainnya tentang pengendalian penduduk dan KB melalui media elektronik, cetak dan media luar ruang serta melalui MUPEN (Mobil Unit Penerangan)	1	Cakupan pelayanan KIE melalui media elektronik	25	100	25	100
		2	Cakupan pelayanan KIE melalui media cetak	50	100	50	100
		3	Cakupan pelayanan KIE melalui media luar ruang	55	100	55	100
		4	Cakupan pelayanan KIE melalui media MUPEN	105	100	105	100

2.2.2.	Penguatan sumber daya penyelenggara program KB melalui pemberdayaan PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD di lapangan dalam penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB (KKB) berbasis Teknologi Informasi (TI)	1	Cakupan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	199	100	199	100
--------	---	---	---	-----	-----	-----	-----

3. Tujuan Ketiga : Penguatan institusi masyarakat dan pemerintah daerah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja dan pemberian konseling tentang permasalahan remaja serta pelayanan kesehatan terhadap lansia juga penguatan terhadap tahapan keluarga sejahtera

3.3.1.	Meningkatnya jumlah keluarga remaja bergabung dalam kelompok BKR	1	Cakupan keluarga yang mempunyai Remaja bergabung dalam kelompok BKR	135	100	135	100
3.3.2	Meningkatnya jumlah keluarga Lansia bergabung dalam kelompok BKL	1	Cakupan keluarga yang mempunyai Lansia bergabung dalam kelompok BKL	157	100	157	100
3.3.3	Meningkatnya kelompok UPPKS aktif berusaha	1	Cakupan kelompok UPPKS aktif yang berusaha	255	100	255	100
3.3.4	Menurunnya keluarga Pra Sejahtera dan KS I	1	Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera dan KS I	21,568	100	21,568	100

4. Tujuan Keempat : Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak

4.4.1	Meningkatnya jumlah kelompok BKB	1	Cakupan kelompok BKB	199	100	199	100
4.4.2	Meningkatnya jumlah keluarga Balita bergabung dalam kelompok BKB	1	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita bergabung dalam kelompok BKB	4,880	100	4,880	100

Evaluasi Kinerja Tahun 2015

Evaluasi kinerja Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2014. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kinerja yang belum terlaksana 100%, untuk diusulkan pada RKPD Tahun berikutnya.

Dari evaluasi kinerja capaian Renstra Tahun 2014, ada yang menunjukkan perolehan nilai capaian kinerja rata-rata diatas 80%, perolehan nilai capaian kinerja 80% dan ada perolehan nilai capaian kinerja dibawah 80%.

Beberapa sasaran strategis yang dicapai diatas 80% antara lain :

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk khusus pada sisi Fertilitas (Kelahiran) dan Mortalitas (Kematian) Ibu dan Bayi dengan tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang dari target 2,6 dengan realisasi 2,3 atau pencapaian 65%
2. Menurunnya disparitas angka kelahiran total (TFR) dari target 2,1 dengan realisasi 1,9 atau pencapaian 90%
3. Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi dari target 85 dengan realisasi 83 atau pencapaian 98%
4. Penguatan sumber daya penyelenggara program KB melalui pemberdayaan PLKB dan Sub PPKBD dalam penyediaan data dan informasi program KKB dari target 85 dengan realisasi 80 atau pencapaian 94%
5. Meningkatnya jumlah keluarga remaja bergabung dalam kelompok BKR dari target 75 dengan realisasi 65 atau pencapaian 87%
6. Meningkatnya jumlah keluarga Balita bergabung dalam kelompok BKB dari target 80 dengan realisasi 72 atau pencapaian 90%
7. Meningkatnya jumlah kinerja aparatur dari target 90 dengan realisasi 85 atau pencapaian 94,4%

Beberapa sasaran strategis yang dicapai = 80% dan dibawah 80% antara lain :

1. Menurunnya kebutuhan ber KB tidak terlayani (unmetneed) dari target 5 dengan realisasi 4 atau pencapaian 80%

2. Meningkatnya kesertaan ber KB PUS keluarga pra sejahtera dan KS I dari target 87 dengan realisasi 95 atau pencapaian 75%
3. Meningkatnya kesertaan UPPKS aktif berusaha dari target 65 dengan realisasi 40 atau pencapaian 62%
4. Menurunnya keluarga pra sejahtera dan KS I target 24 dengan realisasi 15 atau pencapaian 63%

Sasaran yang dicapai 80% dan dibawah 80%, hal ini dikarenakan factor tahapan keluarga pra sejahtera dan factor geografis daerah GALCILTAS (Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan). Untuk itulah focus Renja Badan KB Tahun 2016 ini diarahkan kepada sasaran tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada Tabel.T-VI.C.1.dengan format sebagai beriku

Tabel T-VI.C.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2010 (tahun n-2)	Tahun 2011 (tahun n-1)	Tahun 2012 (tahun n)	Tahun 2013 (tahun n+1)	Tahun 2014 (tahun n+2)	Tahun 2015 (tahun n+3)	Tahun 2014 (tahun n-2)	Tahun 2015 (tahun n-1)	Tahun 2016 (tahun n)	Tahun 2017 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	SPM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA													
A	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera													
1	Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	3,5%	PUS < 20 Th dibawah 3,5%	5,102 103,736 4.9	5,919 108,809 5.4	5,419 108,309 5.0	5,019 108,009 4.6	4,019 107,009 3.8	3,680 106,080 3.5	5,102 103,736 4.9	7,563 84,933 8.9	5,419 108,309 5.0	5,019 108,009 4.6	Menurun
2	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	65.0%	PUS pst KB Aktif (PA) diatas 65%	97,284 108,838 89.4	99,284 118,377 83.9	103,284 122,377 84.4	107,284 126,377 84.9	111,284 130,377 85.4	115,284 134,377 85.8	95,284 108,838 87.5	52,428 84,933 80.4	103,284 122,377 84.4	107,284 126,377 84.9	Meningkat
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet need)	5.0%	Unmeet need < 5%	4,821 103,736 4.6	4,921 108,809 4.5	4,801 108,309 4.4	4,601 108,009 4.3	4,501 107,009 4.2	4,401 106,080 4.1	4,821 103,736 4.6	4,991 84,933 4.6	4,801 108,309 4.4	4,601 108,009 4.3	Menurun
4	Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	80.0%	PUS anggt.BKB ber-KB > 80%	4,408 4,878 90.4	4,508 4,978 90.6	4,608 4,998 92.2	4,708 5,000 94.2	4,808 5,100 94.3	4,908 5,200 94.4	4,308 4,878 88.3	3,955 4,792 82.5	4,608 4,998 92.2	4,708 5,000 94.2	Meningkat
5	Cakupan PUS Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	87.0%	PUS anggt.UPPKS ber-KB > 87%	48,656 74,734 65.1	58,579 75,734 77.3	59,579 76,734 77.6	60,579 77,734 77.9	60,679 77,834 78.0	69,969 79,934 87.5	47,656 74,734 63.8	57,579 74,734 77.0	59,579 76,734 77.6	60,579 77,734 77.9	Meningkat
6	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/PLKB dan Penyuluh KB/PKB disetiap Desa/Kelurahan	1 PLKB Membina 2 Desa	Memenuhi Ratio 1 PLKB : 2 Desa	55 277 19.9	75 277 27.1	165 277 59.6	175 277 63.2	185 277 66.8	195 277 70.4	30 199 10.8	64 199 10.8	199 199 59.6	199 199 63.2	Meningkat

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2010 (tahun n-2)	Tahun 2011 (tahun n-1)	Tahun 2012 (tahun n)	Tahun 2013 (tahun n+1)	Tahun 2014 (tahun n+2)	Tahun 2015 (tahun n+3)	Tahun 2014 (tahun n-2)	Tahun 2015 (tahun n-1)	Tahun 2016 (tahun n)	Tahun 2017 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
B Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi														
1	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30.0%	Penyediaan Alkon Minimal 30 % per tahun	30 30 100.0	30 30 100.0	30 30 100.0	30 30 100.0	30 30 100.0	30 30 100.0	28 30 83.3	29 30 99.5	30 30 100.0	30 30 100.0	Meningkat
C Penyediaan Informasi Data Mikro														
1	Cakupan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100.0%	Memenuhi data mikro keluarga 100% per tahun setiap Desa/Kelurahan	277 277 100.0	277 277 100.0	277 277 100.0	277 277 100.0	277 277 100.0	277 277 100.0	199 199 100.0	199 199 100.0	199 199 100.0	199 199 100.0	Menurun pemekaran MURATARA
II Indikator Kinerja Kunci (PP-6/2008)														
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat														
1. Kesejahteraan Sosial : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera														
1	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	100.0%	Memenuhi Target Pembinaan Peserta KB Aktif (PA)	78%	80%	83%	86%	90%	90%	78%	80%	85%	90%	Meningkat
2	TK Prevalensi Kesertaan KB Pria	100.0%	Memenuhi Target Kesertaan KB Pria	51%	52%	53%	54%	55%	60%	50%	51%	55%	60%	
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	30%	Menurunkan Persentase Keluarga Pra-S dan KS.I	38%	43%	48%	53%	58%	58%	35%	40%	50%	55%	Menurun
B. Aspek Pelayanan Umum														
1	Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	100.0%	Pembinaan PIK-KRR	5%	6%	7%	8%	9%	10%	4%	5%	8%	9%	Meningkat
2	Bina Keluarga Balita	100.0%	Pembinaan BKB	12%	13%	14%	15%	16%	17%	10%	12%	15%	16%	Meningkat

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD dapat dilihat adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD yang berpengaruh juga terhadap keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang baik, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Disparitas TFR masih tinggi (Sasaran ideal, yaitu 2,1)

Di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa disparitas TFR antar wilayah Kecamatan bervariasi, yang terendah pada Kecamatan TPK (Tiang Pumpung Kepungut) dan Sumber Harta pada tingkat 0,24 dan tertinggi di Kecamatan Muara Lakitan dan Tuah Negeri pada tingkat 3,7.

2. Pemakaian kontrasepsi masih rendah

Angka pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/CPR*) masih rendah dan bervariasi antar provinsi, antar wilayah, dan antar status sosial. Sedangkan di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan juga bahwa pada periode 2007 – 2010, penggunaan alat/cara KB cenderung meningkat. Pada tahun 2007, persentase wanita usia subur pernah kawin yang menggunakan alat/cara KB sebesar 61,21 persen menjadi 65,27 persen pada tahun 2010. Lebih lanjut, peserta KB pria terhadap total pasangan usia subur (PUS) berdasarkan hasil SDKI 2007 baru mencapai 2,5 persen, dibandingkan dengan sasaran RPJMN 2004–2009, yaitu sebesar 4,5 persen.

Sedangkan di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan juga mengalami penurunan dari 84,09 % pada tahun 2009 menjadi 78,75 % pada Tahun 2010.

3. *Unmet need* masih tinggi. (Angka ideal < 5 %)

Jumlah pasangan usia subur yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak ber-KB (*unmet need*), meningkat dari 8,6 persen (SDKI, 2002–2003) menjadi 9,1 persen (SDKI, 2007).

Sedangkan di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2009-2010 menunjukkan angka *Unmet need* 20,81 % untuk yang tertinggi pada Kecamatan Ulu Rawas 37,29 % dan terendah pada Kecamatan Tuah Negeri 10,73 %.

4. Pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi masih rendah

SDKI 2007 menunjukkan 60 persen wanita kawin dengan 2 anak, 75 persen wanita kawin dengan 3-4 anak hidup, dan 80 persen wanita kawin dengan 5 atau lebih anak hidup, tidak menginginkan menambah anak lagi. Kecenderungan ini berpotensi meningkatkan kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman jika tidak diikuti dengan upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja, serta penyediaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi PUS.

5. Partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja belum optimal

Salah satu upaya meningkatkan pengetahuan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja adalah melalui pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR).

Data BKKBN menunjukkan jumlah kelompok BKB menurun secara signifikan dari 106.755 kelompok pada tahun 2005 menjadi 69.573 kelompok pada tahun 2007. Jumlah kelompok BKR juga menurun dari 43.752 kelompok pada tahun 2005 menjadi 29.248 kelompok pada tahun 2007.

6. Pembinaan dan kemandirian peserta KB belum optimal

Peningkatan jumlah peserta KB baru menemui hambatan pada saat CPR telah mencapai di atas 50 persen. Hal ini disebabkan oleh PUS yang belum ber-KB pada umumnya adalah kelompok-kelompok sulit yang tersebar di daerah-daerah terpencil, tertinggal, kelompok miskin, dan berpendidikan rendah. Untuk mencapai kelompok-kelompok tersebut, diperlukan upaya inovatif yang, antara lain, dapat dilakukan melalui pembinaan kelompok-kelompok kegiatan (poktan) di tingkat akar rumput, dengan menyediakan akses terhadap sumber permodalan.

7. Kebijakan pengendalian penduduk belum sinergis

Kebijakan kependudukan yang terkait dengan kuantitas, kualitas, dan mobilitas belum konsisten baik secara vertikal maupun horisontal, serta masih terdapat kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. Mengingat penanganan masalah kependudukan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, sinergi para pemangku kepentingan tersebut harus ditingkatkan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

8. Ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan masih terbatas

Sumber data kependudukan yang mutakhir seharusnya berasal dari registrasi penduduk yang meliputi data kelahiran, kematian, dan perpindahan. Sampai saat ini data registrasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih rendahnya cakupan daerah dan kejadian yang dilaporkan, kurangnya jumlah dan rendahnya kualitas tenaga pencatat, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa penting yang dialaminya. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi tentang kewajiban masyarakat untuk melapor dan terbatasnya jangkauan masyarakat ke tempat pelayanan.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

Rancangan awal RKPD atau Renja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan sbb.:
 1. Pelayanan KIE
 2. Pembinaan Keluarga Berencana
 3. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
 4. Pendataan Keluarga
 5. Analisa dan Evaluasi Data Hasil Pencapaian Program KB
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
 1. Fasilitasi Klinik KB
 2. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri
 1. Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP Program KB
 2. Peningkatan/Rehab Ringan Atap, Lantai, Dinding (ALADIN) bagi Keluarga Miskin
 3. Hari Keluarga Nasional

5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 1. Pelatihan Kader Pengelola PIK-KRR dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah

6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
 1. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
 2. Lomba Catur Bina

Rekapitulasi rancangan awal RENJA mencakup 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan, namun setelah diadakan review maka hanya 4 (empat) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan pada Renja Tahun 2016.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Deskripsi yang disajikan, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat dapat diidentifikasi yaitu adanya pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang langsung menjangkau lokasi tempat tinggal mereka sehingga dalam memperoleh pelayanan KB tidak membutuhkan *cost* yang tinggi untuk menjangkau tempat-tempat pelayanan.

Upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2011-2015 adalah melakukan pelayanan secara mobile dan rutin melalui Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN) dan Mobil Unit Penerangan (MUPEN). Sedangkan untuk pembinaan kepada kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat juga dilakukan secara berkala, misalnya terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina

Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) serta kelompok-kelompok lain yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Disamping itu juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok pemberdayaan ekonomi produktif keluarga (UPPKS = Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Namun memang pada faktanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok di masyarakat tersebut sering terjadi fluktuasi (pasang surut) dalam aktifitasnya. Tetapi hal ini terus diupayakan untuk tetap dilakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak hilang dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ada beberapa kebijakan nasional yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun tujuan, sasaran dan program kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai peran penting dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pembangunan keluarga kecil berkualitas. Oleh karena itu pada keluarga berencana, setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera.

Pada tahun 2014 salah satu fokus kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana adalah Revitalisasi Program KB, yang diprioritaskan pada :

- 1) Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- 2) Melakukan pembinaan peningkatan kemandirian Keluarga Berencana;
- 3) Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi;
- 5) Meningkatkan kapasitas SDM, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB;
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Rumusan isu-isu penting tersebut antara lain :

1. Menurunkan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk;
2. Disparitas TFR masih tinggi (Sasaran ideal, yaitu 2,1)
3. Pemakaian kontrasepsi masih rendah
4. *Unmet need* masih tinggi. (*Angka ideal < 5 %*)

5. Pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi masih rendah
6. Partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja belum optimal
7. Pembinaan dan kemandirian peserta KB belum optimal
8. Kebijakan pengendalian penduduk belum sinergis
9. Ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan masih terbatas

Untuk itulah pada RENJA Tahun 2016, tujuan dan sasaran tidak terlepas dari RKP Tahun 2014 dan RPJMN 2015-2019 yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan meningkatkan:

- (i) Daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB tenaga lini lapangan;
- (ii) Sarana dan prasarana fisik pelayanan KB;
- (iii) Sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; serta
- (iv) Sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak.

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2016

Kabupaten : **Kabupaten Musi Rawas**
Nama SKPD : **Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas**
 1. Tujuan Pertama : Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%
(1)	(2)	(3)	(5)
1.1.1 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk khusus pada sisi Fertilitas (Kelahiran) dan Mortalitas (Kematian) Ibu dan Bayi dengan tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang	1 Jumlah Peserta KB Baru/PB	27,731	100
	2 Jumlah Peserta KB Aktif/PA	123,461	100
	3 Persentase Peserta KB Baru MKJP	5,981	100
	4 Persentase Peserta KB Aktif MKJP	29,681	100
	5 Persentase Peserta KB Baru Pria	6,722	100
1.1.2. Menurunnya disparitas TFR (Angka Kelahiran Total)	1 Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	100
	2 Cakupan PUS yang ber KB umur khusus (ASFR) 15 - 19 Tahun	6,618	100
1.1.3. Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi	1 Cakupan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun (Target Nasional 3,5% per tahun)	7,530	100
	2 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 85% per tahun	123,461	100
1.1.4 Menurunnya kebutuhan KB tidak terlayani (unmetneed) dari PUS	1 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terlayani (unmetneed) Target Nasional 5 % per tahun	16,433	100
1.1.5 Meningkatnya kesertaan ber KB PUS Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	1 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB (Target 87 % pertahun)	24,039	100

2. Tujuan Kedua : Peningkatan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi PUS tentang kesehatan reproduksi, melindungi peserta KB dari dampak negative penggunaan alat dan obat kontrasepsi, peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang efektif dan efisien untuk jangka panjang

2.2.1 Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku (PSP) masyarakat khususnya PUS, Remaja dan Anggota Keluarga Lainnya tentang pengendalian penduduk dan KB melalui media elektronik, cetak dan media luar ruang serta melalui MUPEN (Mobil Unit Penerangan)	1 Cakupan pelayanan KIE melalui media elektronik	25	100
	2 Cakupan pelayanan KIE melalui media cetak	50	100
	3 Cakupan pelayanan KIE melalui media luar ruang	55	100
	4 Cakupan pelayanan KIE melalui media MUPEN	105	100
2.2.2 Penguatan sumber daya penyelenggara program KB melalui pemberdayaan PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD di lapangan dalam penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB (KKB) berbasis Tehnologi Informasi (TI)	1 Cakupan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	199	100

3. Tujuan Ketiga : Penguatan institusi masyarakat dan pemerintah daerah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja dan pemberian konseling tentang permasalahan remaja serta pelayanan kesehatan terhadap lansia juga penguatan terhadap tahapan keluarga sejahtera

3.3.1.	Meningkatnya jumlah keluarga remaja bergabung dalam kelompok BKR	1	Cakupan keluarga yang mempunyai Remaja bergabung dalam kelompok BKR	135	100
3.3.2.	Meningkatnya jumlah keluarga Lansia bergabung dalam kelompok BKL	1	Cakupan keluarga yang mempunyai Lansia bergabung dalam kelompok BKL	157	100
3.3.3.	Meningkatnya kelompok UPPKS aktif berusaha	1	Cakupan kelompok UPPKS aktif yang berusaha	255	100
3.3.4.	Menurunnya keluarga Pra Sejahtera dan KS I	1	Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera dan KS I	21,568	100

4. Tujuan Keempat : Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak

4.4.1.	Meningkatnya jumlah kelompok BKB	1	Cakupan kelompok BKB	199	100
4.4.2.	Meningkatnya jumlah keluarga Balita bergabung dalam kelompok BKB	1	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita bergabung dalam kelompok BKB	4,880	100
5.5.1.	Meningkatnya kinerja aparatur	1	Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran	100	100
		2	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100	100
		3	Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi di bidangnya	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016, terdiri dari :

1. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan:
 1. Pelayanan KIE
 2. Pembinaan Keluarga Berencana
 3. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
 4. Pendataan Keluarga
 5. Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KB
 6. Analisa dan Evaluasi Data Hasil Pencapaian Program KB
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan:
 1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
3. Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan:
 1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
 2. Fasilitasi Klinik KB

4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dengan kegiatan:
 1. Orientasi Program KB bagi Masyarakat dalam Pembinaan KB/KR yang Mandiri
 2. Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP Program KB
 3. Peningkatan/Rehab Ringan Atap, Lantai, Dinding (ALADIN) bagi Keluarga Miskin
 4. Hari Keluarga Nasional
5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, dengan kegiatan:
 1. Lomba Catur Bina

Untuk mencapai tujuan dan sasaran atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Program dan Kegiatan tersebut dikategorikan kedalam kegiatan prioritas, kegiatan lainnya (penunjang) dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD, dengan perincian sebagai berikut :

1. Program / Kegiatan Prioritas:
 1. Pembangunan gedung kantor (1 Unit Rumah Penjaga Kantor dan 1 Unit Garasi Mobil)
 2. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (Mobilitas Tim KB Keliling dengan MUYAN=Mobil Unit Pelayanan)
 3. Analisa dan Evaluasi data hasil pencapaian program KB (RAKER Program KB Nasional dan Program Kependudukan)
 4. Pendataan Keluarga (199 Desa/Kelurahan di 14 Kecamatan)
 5. Peningkatan/rehab ringan Atap, Lantai, Dinding (ALADIN) bagi keluarga miskin (Pra-S/KS.I)
 6. Pelayanan KIE (Melalui media luar ruang serta operasional MUPEN)
 7. Peningkatan kinerja petugas lapangan dan IMP program KB (Oprs. 14 KUPT, 17 PLKB, 199 PPKBD, 398 Sub PPKBD)
 8. Pembinaan Keluarga Berencana (Oprs. TKST 51 org)
2. Program/Kegiatan Lainnya (Penunjang)
 9. Fasilitasi Klinik KB (68 KKB di 14 Kecamatan)
 10. Hari Keluarga Nasional
 11. Lomba Catur Bina
 12. Pengadaan computer note book
3. Program dan Kegiatan yang ada pada setiap SKPD;
 13. Penyediaan jasa surat menyurat
 14. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 15. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

16. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
17. Penyediaan jasa administrasi keuangan
18. Penyediaan jasa kebersihan kantor
19. Penyediaan alat tulis kantor
20. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
22. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
23. Penyediaan makanan dan minuman
24. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
25. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
26. Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran
27. Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi
28. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
29. Pengadaan Mebeleur
30. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
31. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
32. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
33. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja di SKPD

Adapun rincian Pagu Indikatif Tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel
Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016

I	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu Indikatif
1	Pembangunan gedung kantor (1 Unit Rumah Penjaga Kantor dan 1 Unit Garasi Mobil)	255.000.000
2	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (Mobilitas Tim KB Keliling dengan MUYAN=Mobil Unit Pelayanan)	166.650.000
3	Pendataan Keluarga	219.613.000
3	Analisa dan Evaluasi data hasil pencapaian program KB (RAKER Program KB Nasional dan Program Kependudukan)	86.745.000
4	Peningkatan/rehab ringan Atap, Lantai, Dinding (ALADIN) bagi keluarga miskin (Pra-S/KS.I)	581.300.000
5	Pelayanan KIE (Melalui media luar ruang serta operasional MUPEN)	106.560.000
6	Peningkatan kinerja petugas lapangan dan IMP program KB (Oprs. 14 KUPT, 17 PLKB, 199 PPKBD, 398 Sub PPKBD)	944.714.000
7	Pembinaan Keluarga Berencana (Oprs. TKST 51 org)	375.804.000
8	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	120.120.000
9	Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KB	85.000.000
Sub Jumlah		2.941.506.000

II	Program/Kegiatan Lainnya (Penunjang)	Pagu Indikatif
10	Fasilitasi Klinik KB (68 KKB di 14 Kecamatan)	107.447.000
11	Hari Keluarga Nasional	188.440.000
12	Lomba Catur Bina	80.000.000
13	Pengadaan computer PC/ Note Book	30.000.000
14	Orientasi Program KB bagi Masyarakat dalam Pembinaan KB/KR yang Mandiri	20.000.000
15	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	171.500.000
Sub Jumlah		597.387.000

III	Program/Kegiatan yang ada pada setiap SKPD	Pagu Indikatif
16	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	59.900.000
18	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.000.000
19	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.160.000
20	Penyediaan jasa administrasi keuangan	123.705.000
21	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.040.000
22	Penyediaan alat tulis kantor	45.261.000
23	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.365.000
24	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000
25	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.960.000
26	Penyediaan makanan dan minuman	139.129.500
27	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	201.111.500
28	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	49.320.000
29	Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	92.090.000
30	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	15.600.000
31	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	17.200.000
32	Pengadaan Mebeleur	48.909.000
33	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000
34	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	204.969.000
35	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	66.700.000
36	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja di SKPD	29.600.000
Sub Jumlah		1.204.520.000

Total jumlah : I + II + III

Rp. 2.941.506.000,-

Rp. 597.387.000,-

Rp. 1.204.520.000,-

Rp. 4.743.413.000,-

Terbilang : " Empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus Tiga belas ribu rupiah,- ".

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 yakni :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas telah diselenggarakan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2016;
2. Walaupun keberhasilan telah dicapai untuk masa yang akan datang Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tetap berkomitmen bahwa tanggung jawab Pertumbuhan Penduduk Tumbuh Seimbang menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtera serta keluarga berkualitas adalah tanggung jawab bersama.

